

---

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA TERHADAP LIKUIDITAS BANK DI INDONESIA

**Dian Ariani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia  
*dianariani@utu.ac.id*

### ABSTRACT

*This study analyzes bank liquidity, both precautionary and involuntary liquidity. This study uses dynamic panel estimation on individual bank data covering 2002 to 2011. The results show that preventive liquidity is more determined by the operation of the bank. On the other hand, involuntary liquidity is more influenced by the condition of the financial system. Regarding size, the effect of financial and macroeconomic system conditions is greater for small banks. In addition, monetary policy in the form of minimum reserve requirements affects precautionary liquidity from small banks; while the central bank's interest rates have less influence on bank liquidity.*

*Keywords: bank liquidity, monetary policy, financial system*

### I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan perantara (*intermediary*) yang dapat menghimpun dan mengalokasikan dana dari atau kepada masyarakat. Kinerja individual bank maupun sistem perbankan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh perilaku bank dalam mengelola asset (penempatan dana) dan liabilitas (penghimpunan dana). Pengelolaan asset dan liabilitas bertujuan memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan dalam batasan tertentu. Batasan tersebut mencakup tingkat likuiditas yang mencukupi, risiko yang rendah, dan modal yang mencukupi. Dengan demikian, pengelolaan asset dan liabilitas memiliki keterkaitan yang erat dengan likuiditas bank. Berdasarkan Keynes (1936), terdapat tiga motivasi dalam memegang kas atau likuiditas yaitu dalam rangka transaksi, berjaga-jaga (*precautionary*), dan spekulasi. Selain itu, berdasarkan pandangan Edgeworth (1888) dengan prinsip *square root of law of precautionary reserves*, cadangan likuiditas bank akan meningkat setara dengan akar dari jumlah transaksi.

Perilaku pengelolaan asset dan liabilitas perbankan di Indonesia saat ini mengindikasikan adanya likuiditas yang cukup banyak (*surplus liquidity*). Kelebihan ini

diserap oleh bank sentral melalui kebijakan moneter dengan pendekatan pasar atau non pasar. Pendekatan pasar dilakukan melalui operasi moneter yang melibatkan transaksi antara bank sentral dengan bankbank yang bertujuan untuk menarik atau melonggarkan likuiditas di pasar, melalui transaksi surat berharga pemerintah ataupun Surat Berharga Bank Indonesia. Di Indonesia, kebijakan moneter yang dilakukan cenderung bersifat kontraktif dengan target penyerapan likuiditas berlebih yang ada di perbankan. Kondisi ini diantaranya sebagai konsekuensi kebijakan *bail out* pada krisis keuangan tahun 1998 dalam mengatasi *bank run* sistem perbankan. Pendekatan kebijakan moneter non pasar dilakukan antara lain melalui aturan kewajiban giro wajib minimum (GWM) bank untuk menempatkan dananya di bank sentral.

## II. LITERATUR

### 2.1. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank

Dari sisi mikro perusahaan, *Bank for International Settlement* (2008) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan bank untuk mendanai peningkatan asset dan memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan kerugian. Valla, Escorbiac dan Tiesset (2006) dan Vodova (2011) mendefinisikan likuiditas bank sebagai kemampuan untuk memenuhi kewajiban kas yang dapat dibedakan dalam likuiditas pendanaan (*funding liquidity*) dan likuiditas pasar (*market liquidity*). Borio (1997,2001) berargumen bahwa perlu dibedakan antara keseimbangan likuiditas *ex ante* sebelum intervensi bank sentral dan *ex post* setelah intervensi bank sentral. Edlin dan Jaffee (2009) menyatakan bahwa tingginya likuiditas perbankan dapat disebabkan karena adanya *credit crunch* atau keengganan bank untuk menyalurkan kredit.

Di Indonesia, seluruh bank umum merupakan peserta (*market player*) PUAB dengan kesenjangan dalam tingkat asset dan modal yang cukup lebar. Di akhir tahun 2011, modal bank berkisar dari Rp0,15 triliun – Rp54 triliun, sedangkan asset bank berkisar Rp0,17 - Rp465 triliun. Bank besar dengan asset diatas Rp100 triliun hanya terdiri dari 7 bank, sedangkan bank dengan asset dibawah Rp1 triliun mencapai 20 bank, dari total 122 bank.

### 2.2. Peran Kebijakan Moneter terhadap Likuiditas Perbankan

Kebijakan moneter dilakukan bank sentral dalam rangka menjaga stabilitas moneter guna mengendalikan likuiditas nasional. Melalui pengendalian likuiditas nasional

diharapkan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan. Di Indonesia, bank sentral menetapkan suku bunga kebijakan yang disebut BI rate. Suku bunga tersebut diharapkan merupakan acuan (*reference rate*) bagi pelaku pasar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter saat ini terdiri dari surat berharga Bank Indonesia, *standing facility* Bank Indonesia, dan giro wajib minimum (GWM). Penggunaan surat berharga Bank Indonesia dilakukan melalui operasi pasar terbuka (*open market operation*), terdiri dari sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan *term deposit*.

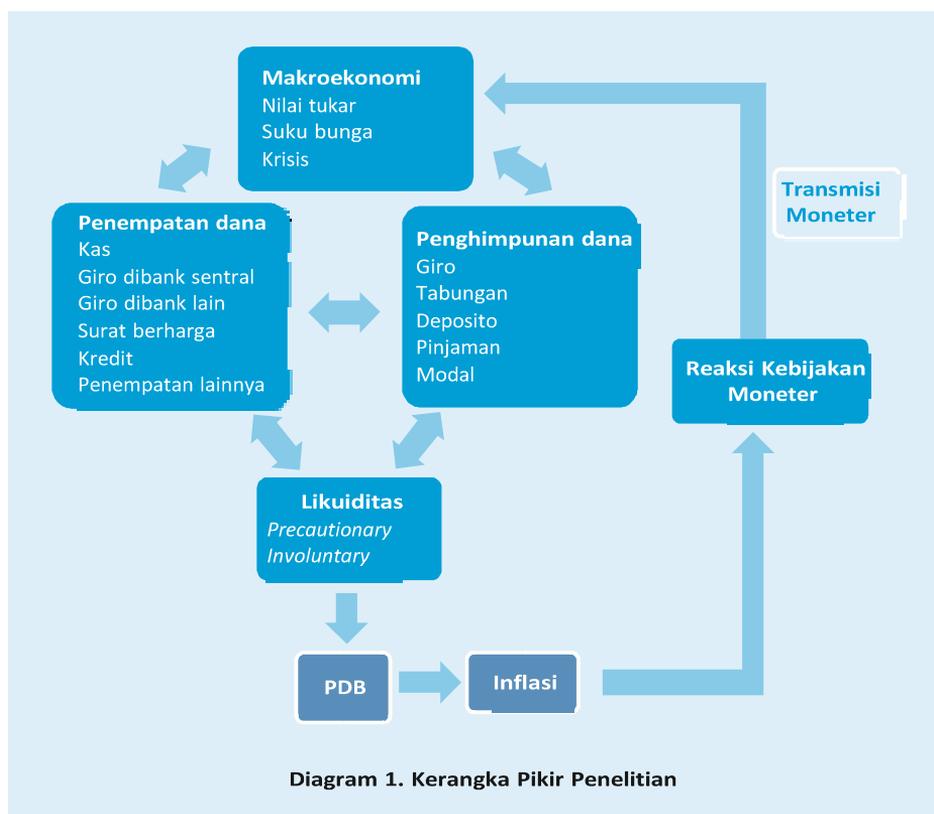
Jangka waktu SBI semula 1 bulan kemudian diperpanjang menjadi 6 bulan di tahun 2011. *Term deposit* merupakan lelang surat berharga Bank Sentral yang lebih panjang mencapai 9 bulan. Di lain sisi, *standing facility* Bank Indonesia yang ditetapkan sejak Juni 2008 merupakan *fine tune operation* dalam rangka mengendalikan suku bunga *overnight* (ON) pasar uang antar bank (PUAB) agar bergerak disekitar suku bunga BI rate (*interest rate corridor*), dengan harapan transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dapat berjalan.

Di lain sisi, kebijakan moneter non pasar melalui instrumen giro wajib minimum (GWM) yaitu kewajiban perbankan untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun. Kebijakan GWM terkini dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan *loan to deposit ratio* (LDR) dalam rangka meningkatkan utilitas optimal likuiditas perbankan melalui peningkatan fungsi intermediasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini bank diwajibkan memenuhi LDR berkisar 78-100%. Di luar batasan tersebut, bank dikenakan penalti tambahan kewajiban GWM tertentu. Bank sentral memberikan jasa giro bagi bank dengan batasan maksimum 3% dari dana pihak ketiga (DPK). Besar imbalan yang disediakan Bank Indonesia adalah sebesar BI rate dikurangi 2,5% sehingga dana tersebut tidak membebani perbankan karena hilangnya *time value of money*.

### III. METODOLOGI

Kerangka pikir dari penelitian ini secara umum sebagaimana pada diagram di bawah ini. Kegiatan usaha bank dalam penghimpunan dan penempatan dana mempengaruhi kondisi likuiditas bank. Pada sisi lain, kondisi likuiditas bank akan mempengaruhi aktifitas perekonomian yang tercermin dari pergerakan PDB (produk domestik bruto), dan selanjutnya ini akan mempengaruhi inflasi. Tingkat inflasi yang terjadi dan ekspektasi inflasi ke depan akan menentukan reaksi kebijakan moneter yang akan dilakukan bank

sentral dalam mengendalikan likuiditas nasional guna mencapai tujuan menjaga tingkat inflasi. Kebijakan tersebut akan mempengaruhi kondisi makroekonomi seperti pergerakan suku bunga dan nilai tukar, maupun pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi kebijakan bank dalam melakukan penghimpunan dan penempatan dana. Penghimpunan dana bank dapat berbentuk giro, tabungan, deposito, pinjaman, maupun modal. Di lain pihak, penempatan dana dapat berbentuk kas, giro di bank sentral, giro di bank lain, surat berharga, kredit, dan penempatan lain. Kondisi ini akan menciptakan siklus yang saling berkaitan satu sama lain.



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah logaritma data bulanan longitudinal/ panel individual bank dari bulan Januari 2002 sampai dengan November 2011 dari

publikasi laporan keuangan bank. Sampel observasi bank yang digunakan adalah 110 bank dari total populasi 122 bank. Dalam studi ini, sampel bank hanya bank konvensional dan tidak termasuk bank syariah, menimbang bank syariah memiliki mekanisme kegiatan operasional dan pasar uang yang berbeda. Pembagian klasifikasi bank dalam pengujian dilakukan berdasarkan batasan asset, bank besar (*big bank*) dengan asset diatas Rp50 triliun, bank menengah (*medium bank*) diatas Rp10 triliun, dan bank kecil (*small bank*) dibawah Rp10 triliun.

Bank terkecil memiliki asset diatas Rp100 miliar karena adanya ketentuan batasan minimal modal Rp100 miliar sejak tahun 2010. Pemilihan jumlah bank dan periode waktu untuk memenuhi persyaratan bahwa dimensi observasi *cross section* lebih besar dari dimensi series waktu ( $N > T$ ) dan untuk mengontrol heterogenitas individu bila terdapat perilaku yang *unobservable*.

Metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel data dinamis dengan *generalized method moment (GMM)*. Pemilihan penggunaan model GMM berdasarkan pada kerangka panel data model sebagaimana diagram dibawah.

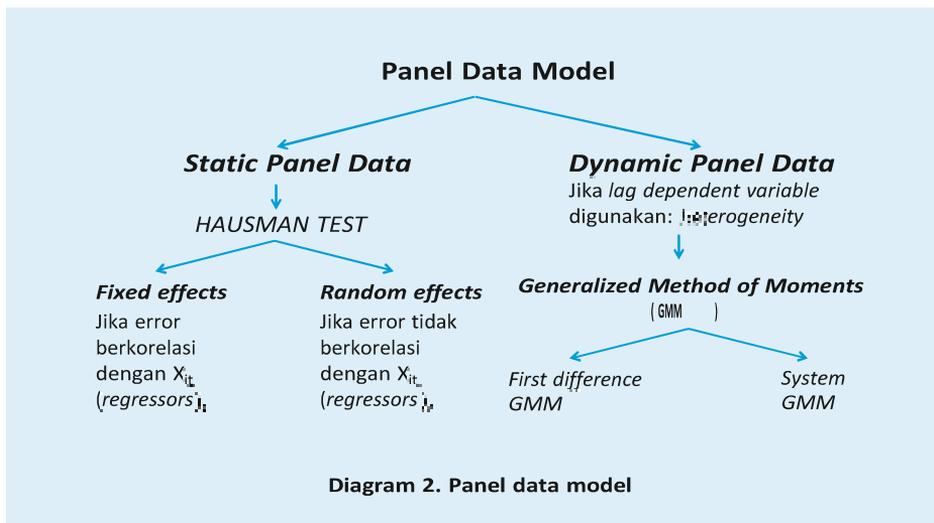


Diagram 2. Panel data model

#### IV. HASIL

Persamaan likuiditas *precautionary* GMM untuk seluruh bank (*all bank*) cukup baik dan tidak bias. Likuiditas *precautionary* seluruh bank secara umum dipengaruhi secara signifikan oleh *lag* dari likuiditas *precautionary* sendiri, tingkat giro wajib minimum ( $RRRATE_t$ ), dana pihak ketiga, dan suku bunga PUAB ( $ON_t$ ).

Berdasarkan klasifikasi bank, pengujian mengindikasikan bahwa *lag* likuiditas *precautionary* paling berpengaruh terhadap likuiditas *precautionary*, demikian pula dana pihak ketiga (kecuali pada bank menengah), diikuti oleh suku bunga PUAB ON. Bank masih melihat kondisi likuiditas historis dalam menetapkan likuiditas saat ini, dan ini sejalan dengan hasil penelitian Bathaluddin dkk. (2012). Positifnya dampak dana pihak ketiga terhadap likuiditas *precautionary* mengingat bahwa meningkatnya penghimpunan dana bank akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk mengalokasikan dana termasuk dalam rangka ekspansi usaha.

Bank berukuran kecil relatif memiliki kegiatan yang terbatas sehingga mencadangkan likuiditas yang relatif kecil. Ini menyebabkan perubahan GWM cenderung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan likuiditas bank kecil tersebut. Di lain sisi, tidak signifikannya dampak kebijakan moneter GWM terhadap bank besar dan bank menengah antara lain karena bank-bank tersebut memiliki likuiditas yang jauh lebih tinggi dan sanggup berfungsi sebagai cadangan (*buffer*) diatas kebutuhan likuiditas untuk kegiatan operasional. Penjelasan lain kemungkinan karena besaran GWM sampai dengan saat ini masih dalam batasbatas yang dapat dipenuhi oleh bank besar dan bank menengah secara mudah. Di samping itu, untuk dana yang ditempatkan di giro bank sentral (sejumlah maksimum 3 persen dari total dana pihak ketiga), bank sentral menyediakan imbalan suku bunga sebesar 2 pesen, dan ini lebih tinggi dibandingkan beban biaya riil yang ditanggung perbankan.

#### Likuiditas *Involuntary*

Persamaan likuiditas *involuntary* menunjukkan likuiditas *involuntary* pada seluruh bank (*all bank*) ditentukan oleh *lag* dari likuiditas *involuntary* sendiri ( $Y_{2i,t}$ ), suku bunga kebijakan moneter BI rate ( $BIRATE_t$ ), suku bunga PUAB ( $ON_t$ ) dan nilai tukar

(ER<sub>t</sub>), Peningkatan suku bunga PUAB, nilai tukar mengurangi likuiditas *involuntary* bank. Pengujian pada seluruh bank menunjukkan bahwa peningkatan BI rate cenderung kurang kuat mempengaruhi peningkatan likuiditas *involuntary*. Bank cenderung menggunakan likuiditas *involuntary* sebagai penyangga dalam menjaga likuiditas apabila terjadi perubahan di pasar keuangan maupun sistem keuangan. Perlu digaris bawahi bahwa estimasi untuk sampel bank berukuran menengah tidak menghasilkan persamaan yang baik meski tidak bias (*upward* maupun *downward biased*). Hal ini terindikasi dari *Sargan test* yang mengindikasikan variabel instrumen yang digunakan kurang valid.

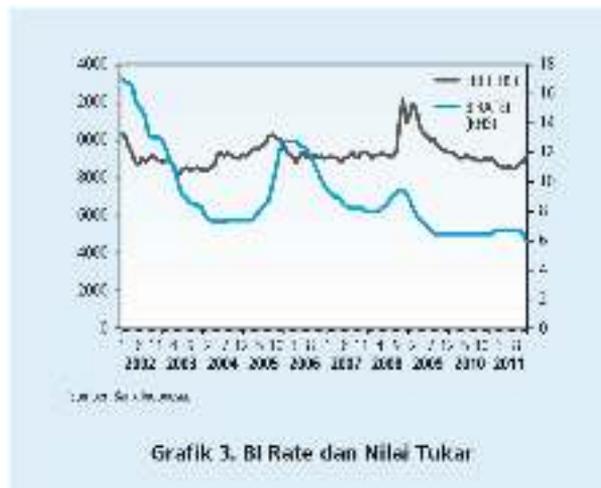
Berdasarkan pengujian seluruh bank, BI rate relatif kecil berpengaruh pada perubahan likuiditas. Namun hasil pengujian ini tidak dapat dikonfirmasi oleh hasil pengujian likuiditas *involuntary* pada bank besar, menengah, maupun kecil. Penjelasan hal tersebut kemungkinan bahwa penempatan bank dalam surat berharga Bank Sentral bukan karena insentif suku bunga BI rate. Hal ini terefleksi pada pergerakan suku bunga BI rate dan penempatan dana bank di surat berharga bank sentral yang tidak menunjukkan hubungan terbalik atas kedua variabel tersebut. Volume penempatan dana bank pada surat berharga bank sentral terus meningkat, walaupun perkembangan suku bunga BI rate secara umum cenderung menurun.

Nilai tukar hanya berpengaruh pada bank menengah, sedangkan suku bunga PUAB ON hanya berpengaruh pada bank menengah dan bank kecil. Likuiditas *involuntary* pada bank kecil dipengaruhi oleh *lag*-nya sendiri, suku bunga PUAB. Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas *involuntary* pada bank kecil juga sangat ditentukan oleh kondisi makroekonomi dan sistem keuangan.

Pada sampel bank besar, likuiditas *involuntary* periode sebelumnya sangat signifikan mempengaruhi pergerakan likuiditas *involuntary* periode sekarang. Di lain sisi, berbagai variabel lain kurang sensitif mempengaruhi pergerakan likuiditas *involuntary* yang mengindikasikan bahwa bank besar memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Ketahanan likuiditas bank besar menunjukkan kondisi yang relatif jauh lebih baik dari pada bank kecil. Bank besar dalam kenyataannya cenderung merupakan pemberi pinjaman di pasar uang (*lender*). Hal ini juga didukung oleh lebih mudahnya bank besar dalam memperoleh penghimpunan dana dengan biaya yang lebih murah dibandingkan bank kecil. Kemudahan tersebut didukung oleh faktor infrastruktur, jejaring dan produk bank yang lebih lengkap, serta kredibilitas bank besar yang dianggap lebih baik. Kerentanan bank kecil tersebut mengindikasikan bahwa perlu dilakukan merger untuk mengubah kemampuan aset bank kecil termasuk ketahanannya terhadap likuiditas.



BIRATEt adalah suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral dalam rangka operasi pasar terbuka. ERT adalah nilai tukar nominal.



$CBSEC_{i,t}$  adalah penempatan dana bank di Bank sentral antara lain dalam bentuk *term deposit*, surat berharga Bank Indonesia, dan fasilitas Bank Indonesia. BIRATE<sub>t</sub> adalah suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral dalam rangka operasi pasar terbuka.



## V. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana perbankan mempengaruhi keputusan likuiditas perbankan. Variabel kebijakan moneter dan pasar keuangan seperti tingkat GWM (giro wajib minimum), suku bunga PUAB (pasar uang antar bank), dan FSI (*financial stability index*) lebih berpengaruh pada likuiditas *precautionary* bank kecil. Selain sangat kuat dipengaruhi oleh likuiditas yang lalu, likuiditas *precautionary* secara umum cenderung lebih dipengaruhi oleh kegiatan operasional bank.

Likuiditas *involuntary* cenderung lebih digunakan sebagai penyangga likuiditas operasional oleh bank. Hal ini terindikasi dari lebih berpengaruhnya situasi di pasar keuangan terhadap likuiditas *involuntary*. Kebijakan moneter melalui suku bunga (BI rate) hanya berpengaruh pada bank menengah, sedangkan pada bank besar dan kecil tidak menunjukkan pengaruh sama sekali. Dengan demikian, pengaruh kebijakan moneter melalui BI rate tidak terlalu kuat mempengaruhi perkembangan likuiditas *involuntary* bank. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan moneter justru lebih berpengaruh pada likuiditas bank kecil. Sistem keuangan dan kondisi makroekonomi

---

seperti *financial stability index*, dan produk domestik bruto cenderung mempengaruhi penetapan likuiditas *involuntary* bank kecil.

Kurang kuatnya pengaruh kebijakan moneter, mengindikasikan bahwa Bank Indonesia tidak perlu menyerap likuiditas melalui suku bunga Bank Indonesia yang tinggi, mengingat likuiditas bank lebih ditentukan oleh kondisi operasional, permodalan, kondisi sistem keuangan, dan makroekonomi.

### REFERENSI

- Acharya, V.V, and Merrouche, O. 2010. *Precautionary Hoarding of Liquidity and Inter-bank Markets: Evidence from the Sub-prime Crisis*. NBER working paper No. 16395.
- Agenor,P.R., Aizenman, J., and Hoffmaister, A. 2000. The credit crunch in east asia: What can bank excess liquidity tells us? National Bureau of Economic Research, Working Paper No.7951.
- Alper, K., Hulagu, T., and Keles, G. 2012. An empirical study on liquidity and bank lending. Central Bank of Turkey.
- Aspachs,O., Nier, E., Tiesset,M. 2005. Liquidity, Banking Regulation and the Macroeconomy. Evidence on bank liquidity holdings from a panel of UK-resident banks. *Bank of England Working Paper*.
- Bagehot, W.1873. Lombard Street, a Description of the Money Market. Henry S. King,
- Bank for International Settlement. 2008. Principles for sound liquidity risk management and supervision.
- Bank for International Settlements. 2009. *International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*.
- Bathaluddin, M.B, Adhi, N.M, dan Wahyu, A.W. 2012. Dampak Persistensi Ekses Likuiditas terhadap Kebijakan Moneter. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan vol 14., No. 3, Bank Indonesia.
- Berger, A.N., dan Bouwman, C.H.2009. Bank liquidity creation, monetary policy, and financial crises. University of South Carolina.